

PELAPORAN KEUANGAN DAN TRANSPARANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK NON PEMERINTAH

Herry Respati

STIE Gici Business School

Email: herryacc@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.61796/jscs.v1i3.144>

Received: 02-06-2024

Accepted: 19-06-2024

Published: 29-06-2024

Abstract:

Laporan keuangan bagi organisasi sektor publik merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penting bagi pengelola organisasi nirlaba yang belum memahami arti dan teknis penyusunan laporan keuangan khususnya sebagai bentuk penerapan akuntabilitas penggunaan dana. Kekurangan SDM yang memahami aspek keilmuan akuntansi juga menjadi penyebab kurangnya pemahaman arti penting dan aspek teknis terkait penyusunan laporan keuangan di banyak organisasi nirlaba.

Keywords: *akuntabilitas, laporan keuangan, organisasi sektor publik*

INTRODUCTION

Menyongsong revolusi industri 4.0 yang semakin booming di berbagai sektor, menuntut adaptasi pada semua jenis profesi saat ini. Menurut Kemenko PMK, dalam era revolusi industri 4.0, setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 75.000 padahal setiap tahun terdapat kurang lebih 31 juta jobseeker mencari pekerjaan baru (Kemenkeo PMK, 2019). Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada sektor public semakin mengemuka di era yang serba modern seperti saat ini. Hal ini mendorong para pengelola organisasi nirlaba untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban keuangan kepada para donator dan stakeholders lainnya.

Kegiatan pemberian materi Pelaporan Keuangan dan Transparansi Sektor Publik Non Pemerintah ini ditujukan bagi masyarakat umum yang bergerak di bidang organisasi nirlaba dan juga bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui proses pelaporan keuangan organisasi nirlaba

Rumusan Masalah

Seberapa jauh organisasi nirlaba menyediakan informasi pertanggungjawaban keuangan kepada para stakeholders dan seberapa jauh pemahaman para pengelola keuangan di organisasi sektor public atas penyusunan laporan keuangan di organisasinya

METHODS

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah rinciannya:

- a. Studi Literatur
Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang mendalam tentang perkembangan terkini dalam profesi akuntan di organisasi nirlaba.
- b. Survei Kepada Pengelola Organisasi Nirlaba
Untuk memahami pandangan dan pemahaman para pengelola organisasi nirlaba mengenai pentingnya pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi, maka dilakukan serangkaian survey lapangan.
- c. Wawancara dengan Praktisi Akuntan
Kami juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa praktisi akuntan yang telah berpengalaman di bidang sektor publik

RESULTS AND DISCUSSION

Entitas publik dapat dikategorikan menjadi sektor pemerintahan dan non pemerintahan. Organisasi nirlaba yang non pemerintahan terdiri dari ormas, parpol, asosiasi, yayasan, organisasi non pemerintah lainnya. Dari sisi aktivitas, organisasi nirlaba dapat saja memiliki aktivitas yang sama dengan organisasi privat yang menghasilkan barang/jasa.

Keunikan yang dimiliki oleh organisasi sektor public terletak pada:

- a. Tujuannya tidak menghasilkan laba
- b. Kepemilikan tidak terbagi atas lembar saham
- c. Pendapatan dapat berasal dari kontribusi, sumbangan tidak terkait dengan penyediaan barang/jasa.

Menurut peranan organisasi sektor publik antara lain adalah:

- a. Berperan dalam politik, sosial, ekonomi, karena pemerintah berperan sebagai regulator.
- b. Manajemen keuangan dan manajemen keuangan publik memegang peran

penting karena dalam organisasi nirlaba terdapat penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau peran entitas tersebut mengalokasikan sumber daya.

- c. Aspek keuangannya cenderung lebih kompleks, karena harus mengikuti ketentuan regulasi yang rinci dan banyak.
- d. Akuntansi sektor public merupakan ilmu yang juga kerap diujikan dalam ujian sertifikasi profesi akuntan, hal ini menandakan pentingnya peran akuntan di sektor public.
- e. Organisasi sektor publik dalam beberapa tahun terakhir berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anthony dan Young (et al, 1990), ciri-ciri organisasi nirlaba

- a. Tidak mencari keuntungan financial.
- b. Ada pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak.
- c. Berorientasi semata-mata pada pelayanan.
- d. Banyak menghadapi kendala pada strategi dan tujuan organisasi.
- e. Didominasi professional.
- f. Pengaruh politik cenderung memainkan peranan penting

Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan dibentuk berdasarkan Perpu 2/ 2017 sebagai perubahan dari UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan dibentuknya ormas adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME.
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi, dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Mewujudkan tujuan bernegara.

Sedangkan fungsi ormas adalah:

- a. Penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial

- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Memelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengelolaan Dana Organisasi Sektor Publik

Langkah-langkah yang dijalankan dalam pengelolaan dana organisasi sektor public adalah:

- a. Siapkan anggaran operasional
- b. Administrasikan setiap program
- c. Susun laporan keuangan setiap program
- d. Pengelolaan database donator
- e. Cermati peluang usaha
- f. Susun laporan keuangan entitas

Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik berdasarkan ISAK 35 terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Perubahan Aset Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan posisi keuangan berisi aset, kewajiban, dan aset neto. Aset yang disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya dan di kelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya dan diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan terikat permanen. Klasifikasi aset neto ini harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK berupa sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer dan perubahan klasifikasi di dalam aset bersih. Batasan penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum di akta pendirian. Contoh ilustrasi:

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL ASET	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Total Liabilitas	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**</i>	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Laporan aktivitas berisi pendapatan dan beban. Pendapatan dikategorikan sebagai pendapatan terikat dan tidak terikat. Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat. Keuntungan/kerugian investasi, aset lain, atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aset bersih. Contoh ilustrasi:

ENTITAS XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administratif	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
Total Beban (catatan E)	XXXX	XXXX
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Total Beban	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	XXXX	XXXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXXX	XXXX

Laporan Perubahan Aset Neto merupakan laporan yang menyajikan perubahan pada pos aset neto yang berasal dari surplus tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Aset neto yang disajikan pada Laporan Perubahan Aset Neto dipisahkan antara aset neto tanpa pembatasan dengan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Contoh ilustrasi:

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
<i>Surplus tahun berjalan</i>	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 <i>Penghasilan Komprehensif Lain</i>		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 TOTAL ASET NETO	 <u>XXXX</u>	 <u>XXXX</u>

Laporan Arus Kas disajikan sesuai PSAK 2 dengan kekhususan pada aktivitas pendanaan berupa:

1. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
2. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
3. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

Contoh ilustrasi:

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	XXXX	XXXX
Kas dari pendapatan jasa	XXXX	XXXX
Bunga yang diterima	XXXX	XXXX
Penerimaan lain-lain	XXXX	XXXX
Bunga yang dibayarkan	XXXX	XXXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	XXXX	XXXX
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	XXXX	XXXX
Investasi bangunan	XXXX	XXXX
	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

CONCLUSIONS

Masih terdapat banyak pengelola organisasi nirlaba yang belum memahami arti dan teknis penyusunan laporan keuangan khususnya sebagai bentuk penerapan akuntabilitas penggunaan dana. Sehingga masih terdapat banyak organisasi nirlaba yang belum dapat menunjukkan bukti bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan cermat, hati-hati, dan bertanggungjawab. Kekurangan SDM yang memahami aspek keilmuan akuntansi juga menjadi penyebab kurangnya pemahaman arti penting dan aspek teknis terkait penyusunan laporan keuangan di banyak organisasi nirlaba.

Penulis menyarankan asosiasi profesi akuntan untuk bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait yang mengurus masalah lembaga nirlaba untuk mendorong terciptanya ekosistem pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan terpercaya di kalangan organisasi nirlaba di Indonesia.

REFERENCES

- KSAP (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan
- ISAK 35 (2019). Ikatan Akuntan Indonesia
- Rambe S, Dasopang E, Ariadin I, Pahutar M, (2023). Badan Layanan Umum (BLU) pada Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 5 nomor 1.
- Maharani A, Muhtar Wahyu A (2013). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Vol. 1 nomor 3.